

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan lain-lain yang di atur dengan perundang-undang yaitu sekitar 75% dari total pemerintah daerah (Hendrawati dkk, 2017) hal ini meyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Undang-undang(UU) No. 23 Tahun 2014 menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana, sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. (Nurhayati, 2015) Kewajiban tersebut bisa dipenuhi pemerintah apabila pemerintah daerah maupun mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada UU No. 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan tanggungjawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakt

bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Penilaian kinerja pemerintah daerah sangat berbeda dengan penilain kinerja perusahaan keuangan pemerintah daerah tidak mengutamakan laba atau keuntungan meskipun ada sebutan surplus dan devicit untuk selisih antara pendapatan dan belanja baik dalam anggaran APBN maupun dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan tetapi surplus dan defisit bukanlah kuni utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu indikator yang menunjukan keberhasilan kinerja pemerintah daerah adalah dengan adanya pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang masih menyisakan catatan tentang kinerjanya pada <http://djpik.depkeu.go.id/> . Berdasarkan informasi yang dipaparkan dalam situs resmi pemerintah daaerah tersebut, kinerja keuangan Provinsi Jawa Timur tidak mencapai target yang di ditetapkan dan beberapa kota kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya Provinsi Jawa Timur pernah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2011(*suarabaya.bpk.go.id*). Adanya pernyataan WDP dari BPK menunjukan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut mangalami penurunan. Penurunan juga bukan hanya pada kinerja keuangan tetapi juga terjadi pada jumlah pendapatan daerah. Berdasarkan data statistik Keuangan Pemerintah. Provinsi Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2017 Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pendapatan daerah sebesar 5,8% dari realisasi tahun sebelumnya. Berdasarkan masalah diatas maka peneliti melakukan penelitian terhadap

kinerja keuangan di Provinsi Jawa Timur di lihat dari beberapa factor yaitu pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan dan *Fiscal Stress*.

Selain PAD, penerimaan daerah dapat diperoleh dari dana perimbangan yang diterima daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Wijaya,2015). Beberapa daerah tergolong beruntung jika daerahnya memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial yang berasal dari pajak ,retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber peneriman daerah.

Pemilihan variabel dana perimbangan ini dikarenakan adanya beberapa daerah seperti Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Jember yang belum sepenuhnya mampu membiayai keperluan daerahnya menggunakan pendapatan asli daerahnya sehingga masih memerlukan transfer dari pemerintah pusat. Selain itu beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda seperti hasil penelitian Puswasih (2017) yang mengatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan tetapi hasil penelitian Mutiaranisa Kurniawati (2015) dan Tri Yuni Pratiwi (2018) mengatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah daerah maka dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali terhadap variabel dana perimbangan dilokasi yang berada. Daerah- daerah yang tidak

memiliki cukup sumber pemerintah daerah juga akan mengalami tekanan fiskal atau yang biasa disebut istilah *Fiscal Stress*.

Fiscal Stress merupakan tekanan anggaran yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberi pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan daerah (Budianas,2019). *Fiscal Stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. *Fiscal Stress* sendiri mulai terjadi ketika daerah tersebut melaksanakan otonomi daerahnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fiscal Stress* ini mulai terjadi pada saat daerah-daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Pada saat *fiscal stress* tinggi ,pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerah (Latief, 2018).

Alasan dipilih *Fiscal Stress* sebagai variabel penelitian adalah variabel *Fiscal Stress* memiliki hubungan dengan variabel sebelumnya yaitu pendapatan asli daerah. Jika *fiscal stress* meningkat maka pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerahnya tidak lain merupakan pendapatan asli daerah. Selain itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda tentang variabel *fiscal stress*. Penelitian Dedy Fernanda (2018) yang dilakukan di provinsi Aceh mengatakan bahwa *fiscal stress* secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan penelitian Sihite(2015) mengatakan bahwa *fiscal stress* secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali terhadap variabel *fiscal stress* dilokasi yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?
3. Apakah *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?
4. Apakah Pendapat Asli Daerah, Dana perimbangan, dan *Fiscal Stress* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja Keuangan di Provinsi Jawa Timur 2017-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan di Provinsi Jawa Timur 2017-2019
3. Untuk menganalisis pengaruh *fiscal stress* terhadap kinerja keuangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019
4. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan *Fiscal Stress* terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019 secara bersama-sama.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap dengan ulasan yang disajikan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya dalam bidang akuntansi tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dan perimbangan dan tekanan fiskal terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian juga berharap agar penelitian ini menjadi dasar perluasan penelitian dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bernilai bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota yang dijadikan sampel penelitian agar dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang membahas yang sama dan pengetahuan pengguna hasil penelitian tersebut.